

BAB IV

ANALISIS ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Daerah

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan daerah dan mendorong pemerataan pembangunan antardaerah melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan terutama program pengembangan pendidikan melalui Sekolah Gratis, program peningkatan kesehatan masyarakat melalui Berobat Gratis (Jamsoskes Sumsel Semesta), program Rumah Murah, program Bantuan Hukum Gratis, Pembangunan Pertanian, Peningkatan Usaha UMKMK dan beberapa program/kegiatan lainnya yang mendukung penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pembangunan Sumatera Selatan yang telah dilaksanakan selama 2008-2013 selain membawa kemajuan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, tetapi juga menyisakan berbagai permasalahan yang harus diatasi secara terencana, terukur dan tuntas. Permasalahan pembangunan daerah di Sumatera Selatan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang (2014-2018) adalah sebagai berikut:

4.1.1 Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan terus menurun dari 1,254 juta orang (17,73%) pada tahun 2008 menjadi 1,104 juta orang (15,47%) pada tahun 2010. Jumlah penduduk miskin terus menurun dari 1,042 juta orang pada tahun 2012 menjadi 1,110 juta orang pada tahun 2013. Sementara, persentase kemiskinan justru meningkat dari 13,48 persen pada tahun 2012 menjadi 14,24 persen pada tahun 2013. Kondisi ini menyiratkan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin lebih lambat dari peningkatan jumlah penduduk.

Permasalahan kemiskinan juga menyangkut tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (P2). Tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan menurun dari 2,63 pada tahun 2010 menjadi 2,41 tahun 2011 dan menjadi 1,85 pada tahun 2012. Tingkat keparahan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan juga menurun dari 0,71 tahun 2010 menjadi 0,65 pada tahun 2011, dan 0,43 pada tahun 2012. Penurunan tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk

miskin semakin membaik dan mendekati garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin berkurang.

Penduduk miskin sebagian besar tinggal di perdesaan, yaitu sebanyak 725,60 ribu (14,50%) lebih besar dibanding jumlah penduduk miskin perkotaan sebanyak 384,77 ribu (13,77%). Perbandingan antarkabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa daerah dengan angka kemiskinan yang relatif tinggi adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Lubuk Linggau. Karakteristik kemiskinan di Sumatera Selatan antara lain adalah terbatasnya akses penduduk miskin terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha dan permodalan; terbatasnya akses pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, rumah layak huni dan kecukupan pangan.

Permasalahan kemiskinan di perdesaan yang umumnya bekerja di sektor pertanian mengindikasikan rendahnya nilai tambah yang dihasilkan dari sektor pertanian, rendahnya kepemilikan lahan yang menyebabkan penduduk menjadi buruh tani, rendahnya sertifikasi kepemilikan lahan mengakibatkan rendahnya akses untuk permodalan dalam menyediakan sarana dan prasarana produksi, terjadinya alih fungsi lahan utamanya pertanian yang menyebabkan pengangguran, masih adanya kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, yang menyebabkan rendahnya kemampuan SDM terutama generasi muda miskin yang selanjutnya akan menyebabkan pengangguran atau menjadi buruh.

Dengan membandingkan kondisi kemiskinan secara nasional, tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan berada di atas rata-rata kemiskinan nasional. Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2011 termasuk peringkat ke-14 provinsi termiskin, bahkan pada tahun 2012 memburuk pada peringkat ke-13 termiskin. Hal ini berarti bahwa laju penurunan kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan masih relatif lambat dibanding provinsi lainnya, meskipun tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin provinsi Sumatera Selatan telah berhasil ditekan dengan signifikan.

Dalam kurun waktu tahun 2008-2013 tingkat penurunan kemiskinan di Sumatera Selatan cenderung mengalami pelambatan yang disebabkan oleh tersebarnya penduduk miskin, belum optimalnya belanja pemerintah daerah, belum sinergisnya kebijakan, program dan kegiatan SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota, dan belum optimalnya peran dunia usaha/swasta dan masyarakat sipil. Oleh sebab itu, tantangan dalam lima tahun mendatang adalah meningkatkan efektivitas program dan kegiatan pembangunan berbasis wilayah khususnya daerah perdesaan, daerah pesisir, dan daerah pinggiran sungai dengan revitalisasi pertanian, perkebunan dan perikanan; mengoptimalkan pelayanan publik dengan memperkuat kerjasama SKPD Provinsi dan SKPD kabupaten/kota; serta dan mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha dan masyarakat sipil dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

4.1.2 Pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Sumatera Selatan pada Pebruari 2013 mencapai 3.904.978 orang atau meningkat 158.605 orang dibanding angkatan kerja Agustus 2012 dan berkurang sebanyak 24.483 orang dibanding Pebruari 2012. Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Sumatera Selatan pada Pebruari 2013 mencapai 3.690.603 orang atau meningkat sebesar 157.671 orang dibanding Agustus 2012 dan berkurang sebanyak 19.080 orang dibanding Pebruari 2012. Sementara, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) meningkat sekitar 2,38 persen dari 69,56 persen pada Agustus 2012 menjadi 71,94 persen pada Pebruari 2013.

Struktur lapangan pekerjaan di Provinsi Sumatera Selatan tidak mengalami perubahan. Sektor pertanian, perdagangan, dan sektor jasa kemasyarakatan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Pada Pebruari 2013 sekitar 52,96 penduduk Sumatera Selatan di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Sementara penduduk yang bekerja di sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 16,41 persen, serta penduduk yang bekerja di sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan mencapai 13,84 persen. Selain itu, sekitar 2.435,8 ribu orang atau 66 persen pekerja di Provinsi Sumatera Selatan bekerja di sektor informal.

Tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Selatan pada Pebruari 2013 mencapai 5,49 persen atau menurun 0,21 persen dibanding Agustus 2012 dan menurun 0,10 persen dibanding Pebruari 2012. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan khususnya di Kota Palembang, Kota Prabumulih dan Kota Lubuk Linggau jauh lebih tinggi dibanding tingkat pengangguran di perdesaan. Hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan alamiah penduduk, arus masuk angkatan kerja dari daerah pedesaan, dan banyaknya pencari kerja pertama kali sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendidikan penduduk di perkotaan. Sementara itu, kesempatan kerja sektor-sektor produktif di perkotaan yang tersedia tidak mampu menampung para pencari kerja. Di sisi lain, tingkat pendidikan penduduk di perdesaan umumnya relatif masih rendah sehingga angkatan kerja yang ada tidak mempunyai banyak tuntutan terhadap jenis pekerjaan yang diinginkan dan mau menerima pekerjaan di sektor tradisional.

Penyebab utama pengangguran adalah terbatasnya lapangan kerja, tidak sebandingnya jumlah tenaga kerja tidak dengan kesempatan kerja dan tidak sesuainya pendidikan tenaga kerja dengan pasar kerja. Permasalahan lain terkait pengangguran yang perlu mendapat perhatian adalah masih banyaknya penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau lebih dikenal dengan istilah setengah penganggur. Dalam lima tahun mendatang, permasalahan dan tantangan bidang ketenagakerjaan yang harus diatasi adalah: (1) terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang baik yang dicerminkan oleh pengangguran lulusan SMA ke atas yang relatif tinggi, (2) tingginya persentase pekerja di sektor informal, (3) adanya kesenjangan upah diantara kelompok pekerja, (4) rendahnya kualitas tenaga kerja

khususnya keahlian yang dimiliki sebagai akibat kurangnya pelatihan berbasis kompetensi dan masih adanya mismatch antara kebutuhan pasar kerja dengan yang dihasilkan dari lembaga pendidikan maupun pelatihan kerja, (5) masih tingginya angka setengah pengangguran.

4.1.3 Pendidikan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah bekerja keras meningkatkan derajat pendidikan penduduk melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan khususnya sekolah gratis. Permasalahan dalam pembangunan pendidikan adalah belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan.

a. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas

Kesempatan memperoleh pendidikan di Sumatera Selatan terus meningkat, tetapi rata-rata lama sekolah masih rendah, APS juga masih rendah khususnya pada jenjang SLTP dan SLTA. Tantangan ke depan adalah memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang mencakup pemerataan dan efisiensi internal pendidikan dasar; meningkatkan akses terhadap pendidikan menengah yang berkualitas; meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi; meningkatkan keberaksaraan; meningkatkan pemerataan akses pendidikan.

b. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas.

Tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas meliputi percepatan penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak; peningkatan ketersediaan buku mata pelajaran; peningkatan ketersediaan dan kualitas laboratorium dan perpustakaan; dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan.

Apabila ditilik dari aspek kualitas terlihat dengan masih rendahnya kualitas siswa, pendidik/tenaga kependidikan serta prasarana sarana. Sementara hasil Nilai Ujian Akhir Nasional belum optimal yaitu masih di kisaran angka 6-7. Ke depan ditargetkan dapat mencapai nilai 7 untuk SD/MI dan 7,5 untuk SMP/MTs.

Di kalangan siswa terlihat adanya kecenderungan semakin luntarnya wawasan kebangsaan, nasionalisme dan budi pekerti. Disamping itu terkait dengan keberadaan pendidik/tenaga kependidikan adalah masih masih rendahnya kesejahteraan, kualifikasi S1/D4 (mencapai sekitar 70%) dan sertifikasi pendidik. Kondisi prasarana sarana pendidikan juga belum sepenuhnya memadai, baik kondisi ruang kelas maupun prasarana sarana pendukung seperti perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer.

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian bersama adalah belum optimalnya pengembangan pendidikan vokasi, dan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu juga belum optimalnya

pengembangan muatan lokal. Muatan lokal penting bagi sarana untuk mengolah kekhasan "identitas" sebagai bagian tidak terpisahkan dari watak. Materi seperti budi pekerti, bahasa dan kesenian merupakan subyek potensial guna merajut watak saling menghormati, toleransi terhadap kebhinekaan, peduli sesama dan lain-lain yang menjadi dasar pembangunan watak bangsa.

4.1.4 Kesehatan

Permasalahan terkait dengan pembangunan kesehatan di Sumatera Selatan adalah tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan yaitu meningkat dari 114,42 (tahun 2008) menjadi 116,34 (Tahun 2012). Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi, kejadian penyakit tekanan darah tinggi pada ibu hamil, masih rendahnya deteksi dini masyarakat serta masih kurangnya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi. Demikian pula dengan Angka Kematian Bayi (AKB) meningkat dari 9,71 (tahun 2008) menjadi 10,75 (Tahun 2012) yang disebabkan masalah neonatal seperti *asfiksia* (sesak napas saat lahir), Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR) serta infeksi neonatus; *pneumonia*, diare serta masalah gizi buruk dan gizi kurang.

a. Status kesehatan ibu dan anak masih rendah

Kondisi saat ini adalah masih tingginya persalinan yang ditolong oleh dukun bersalin, masih tingginya angka kematian bayi, serta masih rendahnya balita yang mendapat imunisasi lengkap. Tantangan ke depan adalah memperkecil persalinan oleh dukun bersalin dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui perbaikan gizi, peningkatan pengetahuan ibu, pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi, serta meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.

b. Status gizi masyarakat masih rendah

Kekurangan gizi pada anak balita telah menurun, namun masih tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang cukup penting. Tantangan ke depan adalah meningkatkan status gizi masyarakat dengan fokus pada ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun, meningkatkan pola hidup sehat, menjamin kecukupan zat gizi dengan memperkuat kerjasama lintas sektor, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.

c. Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit masih tinggi

Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular disebabkan oleh masih buruknya kondisi kesehatan lingkungan, perilaku masyarakat yang belum mengikuti pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan belum optimalnya upaya-upaya penanggulangan penyakit. Tantangan ke depan adalah meningkatkan

cakupan dan kualitas pencegahan penyakit, pengendalian faktor risiko, peningkatan survailans epidemiologi, peningkatan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), peningkatan tatalaksana kasus, peningkatan kesehatan lingkungan, penguatan kerjasama lintas sektor, serta kesiap siagaan menghadapi pandemi penyakit zoonotik.

d. Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas

Tantangan ke depan adalah memperbaiki kualitas perencanaan, produksi dan pendayagunaan yang menjamin terpenuhinya jumlah, mutu, dan persebaran SDM kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan daerah kepulauan yang didukung dengan penguatan regulasi termasuk akreditasi dan sertifikasi.

e. Akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas masih rendah

Jumlah fasilitas kesehatan terus meningkat tetapi akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan masih rendah khususnya di daerah pedesaan. Tantangan ke depan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai untuk merespons dinamika karakteristik penduduk dan kondisi geografis.

Permasalahan lain adalah belum optimalnya penyelenggaraan program dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembiayaan Jamkesmas dan Jamkesda. Masih terdapat kelompok-kelompok tertentu yang memerlukan akses layanan kesehatan namun belum tersentuh seluruhnya seperti anak-anak berkebutuhan khusus, perempuan bekerja dengan resiko tinggi untuk kesehatan reproduksinya, difabel dan lansia. Di sisi lain pelaksanaan Jamkesda yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi permasalahan terkait dengan tunggakan maupun penatakelolaan program jaminan layanan kesehatan secara umum.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga masih belum optimal pelaksanaannya sehingga masih diperlukan upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar mampu dan mau melakukan PHBS untuk mencegah risiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat.

Sarana pelayanan kesehatan di Sumatera Selatan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masih belum proporsional, sehingga masih diperlukan optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

Terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat, permasalahan yang dihadapi adalah masih dominannya pelayanan kuratif yang mengandalkan industri obat dan belum optimalnya pengembangan kearifan lokal melalui pengembangan obat-obatan herbal atau jamu tradisional.

4.1.5 Keadilan Gender dan Perlindungan Anak

Kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional telah tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 yang pada intinya mengintruksikan kepada seluruh Departemen dan Lembaga Non Departemen di tingkat pemerintahan pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengintegrasikan perspektif gender (aspirasi, pengalaman, masalah dan kebutuhan perempuan serta laki-laki) ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan.

Dalam kaitan ini perspektif keadilan gender berfungsi sebagai cara pandang untuk semua upaya penguatan kapasitas birokrasi dalam kapasitasnya melayani kepentingan masyarakat. Melalui perspektif gender sangat membantu birokrasi dalam menjalankan tata kerja dan tupoksinya. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan keadilan gender dan perlindungan anak adalah masih lemahnya fungsi pengarusutamaan perspektif gender dan perlindungan anak dalam sistem birokrasi dan semua pranatanya. Sementara itu dalam tataran publik berbagai permasalahan terlihat dengan masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Permasalahan lain adalah peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dalam rangka menuju kuota 30 % perempuan di legislatif masih rendah. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya SDM perempuan yang memiliki ketertarikan dan berpartisipasi di politik serta kurangnya kepedulian masyarakat untuk memilih wakil perempuan di lembaga legislatif.

Dari sisi perlindungan anak permasalahan yang dihadapi adalah masih lemahnya sistem perlindungan anak utamanya terhadap anak yang rentan (kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak). Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan pencegahan, penanganan dan pengurangan resiko terhadap anak-anak yang rentan sedangkan terhadap anak yang berkebutuhan khusus lebih ditekankan pada peningkatan aksesibilitas dan pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus.

4.2. Analisis Lingkungan Strategis

Analisa isu strategis daerah dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan strategis baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal yang dapat mempengaruhi upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam lima tahun mendatang (2013-2018).

4.2.1 Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal

Identifikasi dan analisa lingkungan internal Provinsi Sumatera Selatan dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam lima tahun mendatang (2013-2018).

4.2.1.1 Identifikasi dan Analisa Kekuatan Daerah

- a. Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar, khususnya sumberdaya pertambangan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata;
- b. Provinsi Sumatera Selatan memiliki wilayah pertanian yang sangat potensial bagi perolehan devisa, khususnya dari komoditi kelapa sawit, karet dan hasil perkebunan lainnya;
- c. Provinsi Sumatera Selatan memiliki kawasan pesisir yang menyimpan potensi bagi pengembangan ekonomi wilayah;
- d. Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi wisata alam, wisata sungai, wisata budaya, wisata religi, wisata olah raga dan wisata kuliner yang sangat kaya dan beragam;
- e. Provinsi Sumatera Selatan memiliki akses transportasi darat, laut, sungai dan udara yang terjangkau untuk memperkuat keterkaitan antarwilayah di Provinsi Sumatera Selatan, dan keterkaitan Provinsi Sumatera Selatan dengan daerah lainnya.

4.1.1.2 Identifikasi dan Analisa Kelemahan Daerah

- a. Belum meratanya infrastruktur dasar antara lain prasarana dan sarana perhubungan; prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan; prasarana dan sarana ekonomi seperti pasar, air bersih, tenaga listrik, jaringan telekomunikasi dan informasi;
- b. Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu termasuk perbaikan status gizi masyarakat;
- c. Belum optimalnya pelayanan pemerintahan yang disebabkan oleh belum tertatanya manajemen kinerja, terbatasnya prasarana dan sarana pemerintahan, serta terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya aparatur;
- d. Belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;
- e. Belum optimalnya kinerja BUMD, dan usaha mikro kecil menengah

- dan koperasi (UMKMK) dalam pengembangan ekonomi daerah;
- f. Meningkatnya jenis dan bobot permasalahan sosial di Provinsi Sumatera Selatan.

4.2.2. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal

Analisa lingkungan eksternal dilakukan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang mungkin muncul dalam lima tahun mendatang berkaitan dengan tiga arus utama perubahan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi.

4.2.2.1 Identifikasi dan Analisa Peluang Daerah

- (1) Globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya perpindahan barang dan jasa, modal, dan informasi lintas daerah dan lintas negara secara bebas, serta interaksi pasar lokal, pasar daerah, pasar dalam negeri dan pasar internasional secara lebih terbuka memberi peluang bagi masa depan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:
- a. Perluasan jaringan transportasi akan meningkatkan mobilitas penduduk dan barang dari dan ke Sumatera Selatan;
 - b. Perluasan pasar regional dan internasional akan meningkatkan kegiatan investasi, produksi dan perdagangan terutama komoditi yang dihasilkan Provinsi Sumatera Selatan seperti karet, kelapa sawit, hasil pertanian dan perikanan;
 - c. Perluasan jaringan dan kerjasama internasional akan mendorong perubahan nilai, etos kerja dan budaya kerja yang lebih produktif, efisien dan efektif bagi masyarakat, pelaku usaha dan aparat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan berbagai kemudahan dan fasilitas dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - e. Perluasan jaringan dan kerjasama pariwisata lokal dan internasional berbasis teknologi informasi akan dapat menciptakan peluang bagi perluasan lapangan kerja, pengembangan pariwisata baik wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner maupun wisata budaya Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Demokratisasi yang ditandai oleh perubahan tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik dengan mengutamakan aspirasi dan partisipasi rakyat telah memberikan peluang bagi Provinsi Sumatera Selatan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, yaitu:

- a. Proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat akan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan adil dengan mempertimbangkan pentingnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar rakyat terutama hak sipil dan politik, serta hak sosial, ekonomi dan budaya rakyat;
 - b. Proses perumusan kebijakan dan pengelolaan sumber daya dan aset daerah akan memperhitungkan pelaksanaan prinsip demokrasi, keadilan, kesetaraan gender, keistimewaan, kekhususan, dan keragaman masyarakat.;
 - c. Proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan akan mengutamakan partisipasi masyarakat sehingga mendorong pengembangan potensi dan peningkatan mutu hidup masyarakat, dan terciptanya suatu lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, bermutu dan bermartabat.
- (3) Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar bagi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- a. Dengan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mempunyai kesempatan yang lebih luas dan terbuka untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien, produktif dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah;
 - b. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan dapat menjalankan fungsi secara optimal dan motivasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu;
 - c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan akan memperhitungkan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya daerah, kearifan lokal, keragaman, kekhususan dan keragaman masyarakat.

4.2.2.2 Identifikasi dan Analisa Ancaman Daerah

- (1) Globalisasi membawa dampak yang dapat menjadi ancaman bagi Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:
 - a. Peningkatan investasi dan percepatan pembangunan akan mendorong eksploitasi sumberdaya alam termasuk tambang, hutan, laut, pesisir dan sumberdaya alam lainnya secara berlebihan yang berdampak negatif bagi kesinambungan pembangunan;

- b. Arus masuk barang dari luar baik dari daerah maupun dari negara lain akan mendominasi pasar lokal yang berdampak bagi menurunnya produksi dan pendapatan para pelaku usaha di Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Krisis pangan, krisis ekonomi dan krisis energi yang berasal dari gejolak pasar internasional akan membawa dampak bagi menurunnya investasi, melemahnya kegiatan produksi, meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, dan menurunnya pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Demokratisasi kemungkinan membawa perubahan yang tidak diharapkan bagi kelangsungan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:
- a. Proses konsultasi antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat sipil seringkali memerlukan waktu yang panjang, berulang dan tidak pasti sehingga berdampak pada kelambanan pengambilan keputusan dan keterlambatan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan;
 - b. Pelaksanaan demokrasi seringkali dipahami secara sempit sebagai kebebasan dalam bentuk berbagai unjuk rasa yang tidak teratur, tanpa ijin dan merusak sehingga akan mengganggu ketertiban dan kehidupan masyarakat;
 - c. Peran partai politik yang cenderung dominan berdampak pada melemahnya tingkat partisipasi masyarakat dan mengaburkan aspirasi masyarakat.
- (3) Desentralisasi dan otonomi daerah membawa dampak yang dapat mengganggu kelancaran pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:
- a. Berbagai peraturan perundang-undangan seringkali tidak konsisten dan kurang sosialisasi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. Persaingan antardaerah dalam penguasaan sumberdaya alam, aset daerah, penetapan daerah perbatasan dan pengelolaan infrastruktur yang cenderung meningkat dan mengabaikan kepentingan yang lebih luas dan jangka panjang;
 - c. Lemahnya koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan, serta lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah;
 - d. Meningkatnya kesenjangan antarkabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sebagai akibat perbedaan kapasitas, sumber daya dan prasarana di daerah.

4.3 Isu Strategis Daerah

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal, isu strategis daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam lima tahun (2013-2018) mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemenuhan hak dasar rakyat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dan bekerja, air bersih dan sanitasi, sumber daya dan lingkungan hidup;
- b. Belum meratanya akses dan mutu layanan pendidikan yang antara lain dipengaruhi oleh kurangnya prasarana dan sarana, terbatasnya jumlah dan mutu tenaga pengajar, serta belum meratanya persebaran tenaga pengajar;
- c. Belum meratanya akses dan mutu layanan kesehatan sebagai akibat terbatasnya prasarana dan sarana layanan kesehatan, belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga kesehatan di daerah perdesaan, serta rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. Belum optimalnya pengelolaan pertanian dan perkebunan, serta kelautan dan perikanan sebagai modal dasar dalam percepatan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh terbatasnya jaringan prasarana, terbatasnya akses permodalan, kurangnya penyuluhan, dan tingginya fluktuasi harga pasar;
- e. Terbatasnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat produksi, pusat-pusat pengolahan, pusat-pusat perdagangan, pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang disebabkan oleh belum meratanya pembangunan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan lingkungan yang menghubungkan antarkabupaten/kota dan antarkecamatan; serta belum terpadunya sistem transportasi antara darat-laut-dan udara yang menghubungkan seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- f. Belum optimalnya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana ketenagalistrikan;
- g. Belum optimalnya investasi dalam mendorong percepatan pembangunan daerah sebagai akibat belum terciptanya iklim usaha yang kondusif, lemahnya promosi daerah, dan terbatasnya kerjasama antardaerah;

- h. Belum optimalnya layanan di bidang hukum dan pemerintahan terutama dalam memberikan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu;
- i. Belum optimalnya penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maju; rendahnya budaya masyarakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; dan belum optimalnya sinergi Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan teknologi dan inovasi daerah;
- j. Kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kelestarian lingkungan telah menyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan menimbulkan kecenderungan penurunan daya dukung lingkungan.
- k. Lemahnya koordinasi antarSKPD untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
- l. Potensi wilayah yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Masih banyak yang tidak produktif dalam jenis penggunaan tegalan dan tanah belukar (20%) yang masih bisa dimanfaatkan dan ditingkatkan produktifitasnya sebagai kawasan budidaya. Pemanfaatan dan peningkatan produktifitas pada kawasan ini akan memberikan dukungan pada program Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional. Program lumbung pangan nasional memiliki pengertian bahwa Sumatera Selatan sebagai produsen pangan dan penyedia cadangan pangan nasional, sebagai pusat pengembangan agribisnis dan agroindustri sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Tentu saja pemanfaatan ini harus didukung oleh penyediaan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan, peningkatan SDM dan penguatan kapasitas kelembagaan.
- m. Provinsi Sumatera Selatan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 November 2004 dicanangkan sebagai Provinsi Lumbung Energi Nasional : Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyedia dan pemasok energi yang bersumber dari bahan bakar fosil dan non fosil untuk kebutuhan berbagai sektor seperti industri komersil, transportasi, dan rumah tangga di Provinsi Sumatera Selatan, Nasional, dan untuk ekspor energi primer dan sekunder sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan program ini telah disusun sebuah perencanaan yang komprehensif tahun 2006. Rencana-rencana tersebut perlu diimplementasikan secara konsisten dan disinkronkan dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan.
- n. Belum optimalnya peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan dalam

wilayah yang lebih luas terutama pusat-pusat permukiman yang berada di sekitar perbatasan dengan provinsi lain dan pusat-pusat permukiman yang berada di sekitar Kota Palembang (PKN) serta pusat-pusat permukiman hasil pemekaran. Selain itu juga, masih rendahnya keterkaitan spasial dan fungsional antar pusat-pusat permukiman/pertumbuhan tersebut. Dengan kata lain sistem kota-kota menunjukkan dominasi Kota Palembang (*primate city*) sehingga terjadi ketergantungan secara wilayah terhadap Kota Palembang yang mengakibatkan ketidakefisienan struktur ruang. Pola *primate city* demikian pada masa yang akan datang perlu dihindari dengan melakukan penguatan kota-kota berhirarki di bawah *primate city*, yaitu PKW. Penguatan dilakukan terutama pada PKW yang jauh dari Kota Palembang (seperti Lubuk Linggau, Lahat, Baturaja) sehingga kota-kota tersebut dapat berperan lebih besar dalam pelayanan skala wilayah secara seimbang.

- o. Adanya sebagian wilayah, terutama pada kawasan pinggiran dan perbatasan dengan provinsi lain, pusat pelayanannya mengarah pada kota-kota besar di Provinsi Lampung (seperti Tanjung Karang, Kotabumi dan Menggala) yang secara geografis lebih dekat dengan kawasan tersebut (seperti sebagian Kabupaten OKU Selatan, sebagian Kabupaten OKU Timur, sebagian Kabupaten OKI). Strategi yang perlu dilakukan adalah penguatan sistem kota-kota dengan meningkatkan fungsi dan hirarki kota serta aksesibilitas kota-kota yang berada pada kawasan perbatasan atau pinggiran tersebut.
- p. Peran yang besar secara nasional yang dimisikikan oleh Provinsi Sumatera Selatan membutuhkan dukungan infrastruktur yang handal, khususnya transportasi. Saat ini, sistem transportasi yang ada masih kurang terpadu dan kapasitas moda transportasi masih rendah. Perlu pengembangan sistem transportasi multimoda secara terintegrasi, pengembangan jalan bebas hambatan, jalan kereta api, dan terminal peti kemas. Dalam muatan rencana RTRWN sebenarnya sudah ada rencana yang mendukung hal tersebut, yaitu adanya rencana jalan bebas jembatan Pulau Sumatera yang juga menghubungkan kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan, serta adanya rencana Pelabuhan Tanjung Api-Api.
- q. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai banyak sungai, baik sungai besar maupun kecil yang selain merupakan potensi, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan apabila penanganan lingkungan tidak dilakukan dengan cermat, misalnya timbulnya masalah banjir. Diharapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini dapat mempertimbangkan perwilayahan DAS dalam pengaturan sistem kota-kota dan dalam pengembangan/pemanfaatan ruangnya memperhatikan tata air secara berkelanjutan.